

**ANALISIS PERAN KORPORASI PETANI DALAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PERTANIAN**
**ANALYSIS OF THE ROLE OF CORPORATE FARMERS IN AGRICULTURAL AREA
DEVELOPMENT**

Eka Miftakhul Jannah¹, Dadan Permana, Riki Warman dan Moehar Daniel
Badan Riset dan Inovasi Nasional

ABSTRACT

The development of agricultural areas based on farmers' corporations is a decision of the Indonesian government stipulated through Kepmentan No. 18 of 2018. Farmer corporations are expected to be the driving force for increasing agricultural business productivity and able to realize farmer welfare. By referring to the research results and several related references, an analysis of the benefits and roles of the corporation is carried out in the process of developing agricultural areas. The key to success in the development and empowerment of farmer corporations lies in the hands of the coaches and experts as companions, at least until the corporation can run its business and organization in a professional and independent manner. Farmers' corporations can't just be let go once they're formed, as is the case with the formation of farmer groups and other farmer institutions. Mentoring and empowerment must be carried out intensively so that the corporation finds its appropriate and independent form. When the corporation is stable and can become a farmer-owned company with many business branches according to the potential of the area, the farmers will change their status from government-guided to government partners.

Keywords: corporation, agricultural area, empowerment

INTISARI

Pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi petani merupakan keputusan pemerintah Indonesia yang ditetapkan melalui Kepmentan No.18 Tahun 2018. Korporasi petani diharapkan akan menjadi penggerak peningkatan produktivitas usaha pertanian dan mampu mewujudkan kesejahteraan petani. Dengan merujuk hasil penelitian dan beberapa referensi terkait dilakukan analisis manfaat dan peran dari korporasi tersebut dalam proses pembangunan Kawasan pertanian. Kata kunci keberhasilan dalam pembangunan dan pemberdayaan korporasi petani terletak di tangan para Pembina dan tenaga ahli sebagai pendamping, minimal sampai korporasi bisa menjalankan usaha dan roda organisasi secara profesional dan mandiri. Korporasi petani tidak bisa dilepas begitu saja setelah dibentuk seperti halnya pembentukan kelompok tani dan Lembaga petani lainnya. Pendampingan dan pemberdayaan harus dilakukan intensif sehingga korporasi menemukan wujudnya yang sesuai dan mandiri. Pada saat korporasi sudah stabil dan bisa menjadi sebuah perusahaan milik petani dengan banyak cabang usaha sesuai potensi kawasannya maka petani akan berubah status dari *binaan* pemerintah menjadi *mitra* pemerintah.

Kata kunci: korporasi, kawasan pertanian, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian sampai saat ini masih merupakan bagian sector utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kondisi ini

sangat berkaitan dengan potensi dan kondisi wilayah yang mayoritas masyarakatnya masih hidup dengan mengandalkan nusaha di bidang pertanian (Biro Perencanaan. 2013). Dalam proses pembangunan tersebut tentu banyak hal

¹ Corresponding author: eka_eg@yahoo.com

yang harus diperhatikan, mulai dari ketersediaan anggaran pembangunan, dukungan wilayah dan lingkungannya, sumberdaya manusia, peralatan dan juga yang paling menentukan adalah teknologi dan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan fungsinya, keberadaan dan efektivitas teknologi sangat didambakan oleh petani dan pengusaha pertanian untuk peningkatan produksi dan efisiensi usaha yang mereka lakukan. Dengan teknologi yang tepat dan efektif serta efisien, petani bisa memperoleh hasil dan pendapatan yang lebih tinggi, sekaligus berperan dalam meningkatkan produksi nasional secara global (Moehar Daniel, 2016).

Sebelum para peneliti bergabung dengan BRIN (badan Riset dan Inovasi Nasional), tugas untuk menghasilkan dan merakit teknologi ini menjadi tugas utama dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dibawah bendera Kementerian Pertanian republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai ujung tombak pengembangan teknologi pertanian di Indonesia maka Balitbangtan selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk menghasilkan teknologi yang siap pakai, efisien serta berdampak positif bagi perkembangan sektor pertanian nasional dan sumberdaya manusia yang berperan didalamnya. Teknologi ini diuji, dicoba, dirakit dan didiseminasikan melalui berbagai instansi dibawahnya. Mulai dari Pusat Penelitian, Balai Besar, sampai kepada Balai Penelitian Komoditas, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang ada di setiap provinsi (Hendriadi, 2013).

Sebagai salah satu ujung tombak yang sangat dekat dengan para pengguna maka BPTP dengan para peneliti dan penyuluhnya selalu aktif dan progresif untuk merakit dan mendiseminasikan paket teknologi untuk dicobakan dan digunakan langsung bersama dengan pengguna tempatan. Sehingga dengan metode pendekatan ini, teknologi yang dihasilkan bisa cepat sampai dan diaplikasikan

oleh para petani. Disamping diseminasi melalui berbagai media, seperti media cetak, media tatap muka, media terproyeksi dan media tercetak, masih banyak cara yang digunakan dalam upaya menyebarkan dan memasyarakatkan teknologi-teknologi yang dihasilkan (Moehar Daniel, 2011). Salah satu upaya yang cukup efektif dewasa ini adalah melalui pendekatan partisipatif kepada petani yang tergabung dalam sebuah lembaga. Baik berbentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun *korporasi petani*.

Korporasi Petani. Korporasi petani merupakan sesuatu yang baru dalam proses pembangunan pertanian Indonesia. Gagasan dan terobosan ini ditetapkan untuk diterapkan diseluruh Nusantara melalui Keputusan Menteri Pertanian No.18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani (Kementan, 2018). Korporasi petani akan melahirkan para petani profesional yang berorientasi keuntungan dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Peran dari lembaga ini semakin hari semakin dibutuhkan, terutama dalam upaya peningkatan motivasi dan profesionalitas petani. Disadari bahwa Lembaga petani (Kelompok Tani, Gabungan kelompok Tani, Koperasi Pertanian dan lainnya), yang selama sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan pertanian belum mampu meningkatkan posisi tawar petani. Sampai saat ini petani baik sebagai individu maupun sebagai kesatuan dalam Lembaga, masih mempunyai posisi tawar yang lemah. Begitu juga halnya dalam proses peningkatan produksi, yang masih berjalan lambat dan tidak signifikan.

Sasaran utama yang akan menjadi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana merekayasa kumpulan petani menjadi sebuah “korporasi”. Lembaga ini yang akan menjalankan roda usaha dari asset yang dikuasai oleh korporasi tersebut. Canangan gagasan atau ketetapan ini diambil karena belajar dari pengalaman pembangunan

masa lalu. Sangat banyak program dan kegiatan terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik mengenai pengembangan sistem usahatani, budidaya komoditas, pengembangan desa terpadu, pengembangan kelompok tani, kelompok usaha agribisnis, Inbis dan banyak lagi lainnya. Semuanya sampai saat ini belum mampu memperkuat posisi tawar petani dan sekaligus juga belum mampu mensejahterakan sebagian petani. Kondisi petani sampai saat ini belum banyak berubah, masih berada dalam posisi tawar yang sangat lemah, yang selalu menjerit bila muncul gejala dan kebijakan pemerintah yang tidak memihak mereka. Kelemahan yang berulang adalah tidak fokus dan tidak intensifnya, serta tidak konsisten dan tidak berkelanjutannya pembinaan yang dilakukan, terutama dalam pembinaan kelompok tani. Kesannya sampai saat ini kelompok tani hanyalah sebuah lembaga untuk memudahkan pertanggungjawaban anggaran pembangunan dimana petani berkumpul untuk mendapatkan ilmu, keterampilan, mendapatkan bantuan sehingga dianggap menjadi petani yang maju. Sementara mayoritas anggota kelompok tersebut kehidupannya tidak beranjak menjadi lebih baik, apalagi sejahtera.

Kebijakan Pemerintah melahirkan dan memberdayakan Korporasi Petani merupakan sebuah gagasan dan tindakan yang diharapkan akan merubah wajah pertanian dan nasib petani Indonesia. Diharapkan lembaga petani tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan dan mempermudah administrasi pertanggungjawaban anggaran pembangunan, tetapi sudah harus berubah menjadi motor penggerak perkembangan agribisnis daerah yang dikelola oleh petani-petani profesional yang berorientasi keuntungan. Yaitu sebuah Lembaga yang mampu menggerakkan, meningkatkan serta mengembangkan teknologi yang tersedia untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah. Lembaga yang dibangun seharusnya juga mampu sebagai pengayom dan pembina

perekonomian para anggotanya. Dan diharapkan dengan terwujud dan dikembangkannya lembaga petani profesional kedepan, pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian ini bisa lebih cepat berkembang, mapan dan mampu bersaing. Sehingga berkembangnya pasar internasional tidak merupakan sesuatu yang harus dikhawatirkan, karena semua produk yang dihasilkan adalah produk yang bermutu dan berdaya saing.

Sehubungan dengan kondisi dan perkembangan diatas, makalah ini mencoba mengemukakan bagaimana seharusnya rekayasa pembangunan korporasi dilakukan serta menganalisis peran dari Korporasi tersebut dalam proses pembangunan pertanian. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan bacaan dan pedoman bagi pemberdaya dan pembina Lembaga petani di lapang, sehingga Lembaga ini bisa menjadi Lembaga yang mempunyai daya saing yang dikendalikan oleh para petani professional.

Sebagai sesuatu yang baru, sebenarnya korporasi ini tidak tumbuh begitu saja. Keberadaannya merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan dari program terobosan sebelumnya yang dilahirkan oleh Kementerian Pertanian melalui Kepmentan no. 56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Program ini bertujuan untuk mempercepat pewujudan swasembada pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dengan pendekatan pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat didalamnya secara berkeadilan. Korporasi yang akan dibangun merupakan Lembaga petani yang professional,

berorientasi kepada peningkatan produksi dan keuntungan (Kementan, 2018).

Sebagai lembaga petani yang mengarah ke professional maka Korporasi Petani harus mempunyai legalitas dengan mengurus dan mendapatkan Badan Hukum. Pengajuan dan penerbitan Badan Hukum ini bisa difasilitasi oleh Pemerintah sebagai bantuan awal untuk melakukan operasi. Dengan ber Badan Hukum Korporasi Petani bisa menggalang kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya termasuk memperoleh pinjaman penguatan modal dari perbankan atau lembaga keuangan yang kredibel.

Kawasan Pertanian. Sesuai dengan arah Pembangunan Pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan Kepmentan No. 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Program ini sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh daerah dengan menyusun dan menetapkan kawasan-kawasan komoditas unggulan setempat yang di SK kan oleh Gubernur untuk kawasan pertanian provinsi dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati/Walikota untuk kawasan pertanian kabupaten/kota (Kementan. 2018). Kawasan inilah yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sebagai sentra agribisnis dan titik tumbuh ekonomi disetiap daerah sehingga berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dalam proses pengembangan kawasan-kawasan komoditas unggulan atau kawasan pertanian ini, peran inovasi teknologi tidak dapat diabaikan. Begitu juga peran dari kelembagaan pemerintah dan lembaga petani yang berfungsi sebagai pelaksana dan motor penggerak inovasi pada lahan usaha yang dikembangkan. Semua program terobosan yang ditetapkan oleh Kementerian diatas merupakan wadah atau

media utama bagi penerapan dan pengembangan inovasi teknologi dan diseminasi yang dilahirkan oleh para peneliti dan penyuluh Badan Litbang Pertanian.

TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI

Menurut Sudaryanto, *et.al* (2005) fungsi BPTP porsinya lebih banyak pada kegiatan bersifat kajian (*assesment*) bukan penelitian murni atau dasar. Kajian yang dimaksud adalah, melakukan pengujian terhadap suatu teknologi untuk mendapatkan alternatif paket teknologi secara teknis memungkinkan, ekonomis menguntungkan, secara sosial diterima petani, ramah lingkungan dan mendukung kebijakan Pemda setempat. Paket teknologi yang dimaksud merupakan integrasi beberapa komponen teknologi yang mampu memecahkan masalah petani. Oleh sebab itu, paket teknologi yang dikaji harus bersifat pemecahan masalah (*problem solving*), serta masalah yang dikaji adalah masalah teknis (*researchtabel*).

Komponen teknologi yang dikaji adalah komponen teknologi hasil penelitian dari Balai Penelitian Komoditas, Pusat Penelitian dan Pengembangan, dan atau dari sumber lain (perguruan tinggi, lembaga internasional, atau teknologi asli daerah). Komponen teknologi tersebut secara teknis diuji di kebun percobaan atau laboratorium. Untuk mempercepat menghasilkan alternatif paket teknologi akan diinternalisasikan dalam satu paket teknologi. Selanjutnya, dikaji secara paralel dalam waktu yang bersamaan di lahan petani (*on farm*), untuk menguji kesesuaian baik dari aspek teknis maupun aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik (kebijakan). Setelah paket teknologi tersebut dikaji dan terbukti unggul dibandingkan dengan teknologi petani, maka teknologi tersebut siap untuk didiseminasikan oleh penyuluh yang ada di BPTP ke target sasaran yang lebih luas. Teknologi tersebut dikenal dan nama *teknologi spesifik lokasi*, yaitu teknologi

yang pemnafaatannya mempunyai batasan tertentu sesuai dengan agroekosistem wilayah. Jauh berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya, dimana teknologi pertanian tersebut digeneralisasi diseluruh wilayah tanpa memperhitungkan kesesuaian agroekosistem wilayah.

Dalam penggunaan teknologi spesifik lokasi digunakan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang kemudian dikembangkan menjadi pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu. Prinsipnya adalah terpadu, sinergis, spesifik lokasi, dan partisipatif. Terpadu dan sinergis dalam artian semua teknologi, sumberdaya manusia, sumberdaya alam saling dipadukan untuk memberikan efek sinergis yang lebih baik. Spesifik lokasi artinya pemilihan teknologi disesuaikan dengan lokasi. Partisipatif artinya perlunya keterlibatan semua pihak terutama masyarakat.

Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan penyebarluasan teknologi pertanian spesifik lokasi oleh BPTP dilakukan dalam konteks hubungan konsultatif dan bekerjasama dengan instansi terkait, baik ditingkat provinsi dengan Komisi Teknologi maupun kabupaten/kota. Penyebarluasan atau Diseminasi hasil penelitian dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan Gelar Teknologi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penelitian dan pengkajian. Gelar Teknologi adalah uji terapan paket teknologi hasil penelitian untuk mendapatkan kepastian kesesuaian paket/komponen teknologi yang dihasilkan tersebut dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi setempat. Gelar teknologi juga dapat dilaksanakan dan merupakan bagian dari penelitian dan pengkajian Sistem Usahatani (SUT) dan Sistem Usaha pertanian (SUP) komoditas unggulan. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi pertanian spesifik lokasi kepada pengguna, dengan prosedur dan metoda tertentu.

PERAN KORPORASI DALAM ADOPTI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI

Di dalam sebuah kawasan yang dibangun akan berinteraksi tiga kegiatan sekaligus yaitu usahatani dengan sistemnya, teknologi sebagai gandengannya dan petani dan atau lembaganya sebagai motor penggerak. Disamping tiga komponen tersebut ada satu komponen lagi yang berperan aktif tetapi berada di luar, yaitu para pembina, pendamping, tenaga ahli dan aparat pemerintah yang akan selalu mendampingi, membina dan memperhatikan serta memfasilitasi agar petani dan lembaganya betul-betul mampu memainkan peran sebagai motor penggerak sistem usahatani dan potensi-potensi usaha yang ada didalam kawasan tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Sinergitas dan keberlanjutan serta komitmen dan kinerja dari empat komponen ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan kawasan pertanian yang berbasis korporasi. Selama ini system tersebut belum berjalan dengan baik, karena pemegang peran utama yaitu petani dan lembaganya belum memainkan peran yang seharusnya mereka lakukan. Dalam menjalankan usahanya petani masih berjalan sendiri-sendiri sementara Lembaga tidak berperan dalam memutuskan kegiatan yang diterapkan. Jelas, ada sub system yang terputus, sehingga wajar kalau dampak dari pembangunan pertanian sebelum ini belum maksimal.

Dengan ditetapkannya program terobosan Kementerian Pertanian, Korporasi Petani melalui Permentan No.18 Tahun 2018, proses pembangunan Pertanian diharapkan akan menjadi lebih lancar, lebih efektif dan lebih efisien. Harapan dan keberhasilan ini tentu sangat bergantung kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapang, terutama yang berkaitan dengan partisipasi dan aktivitas petani serta pengarahan dan pendampingan dari

pemerintah dan yang berkepentingan, tetapi sampai saat ini belum ada berita atau pernyataan tentang kisah sukses pembangunan korporasi yang telah berjalan. Salah satu contoh adalah pembangunan Korporasi Petani dalam persiapan Penas Tani di Kota Padang pada tahun 2019. Pembangunan Korporasi Petani sudah berjalan dengan baik tetapi tidak berlanjut karena Penas Tani diundur pelaksanaannya karena Pandemi covid 19. Seyogyanya pembangunan ini bisa membuktikan bahwa Korporasi Petani memang merupakan instrument yang paling tepat dalam upaya pembangunan pertanian kedepan. Karena mampu meningkatkan produktivitas, produksi, pendapatan petani dimana posisi tawar petani meningkat dan punya daya saing. Berikut diuraikan peran dan fungsi korporasi petani dalam peningkatan produksi dan posisi tawar petani yang berdaya saing.

Pendekatan. Pendekatan yang paling tepat dalam membangun Korporasi Petani adalah secara partisipatif, dimana petani diposisikan ikut sebagai subjek dalam pembangunan diri dan lembaganya. Dengan pendekatan ini petani merasa dihargai dan bisa menumbuhkan semangat serta motivasi untuk meningkatkan kapasitas pribadi dan lembaga untuk kemajuan bersama. Proses awal ini sangat menentukan keberhasilan dalam pendirian dan pemberdayaan korporasi petani kedepan. Kemahiran dan pengalaman dari pendamping serta tenaga ahli sangat diperlukan, terutama dalam sosialisasi dan pencerahan serta pemahaman akan makna, fungsi dan potensi yang ada pada korporasi. Daya Tarik, potensi serta efektivitas dari korporasi akan sangat mempengaruhi minat dan motivasi petani, terutama yang akan dipilih menjadi pengurusnya.

Pengurus Korporasi Petani. Sudah sangat dipahami oleh semua pihak bahwa kunci kemajuan sebuah usaha itu terletak pada manajemen. Dan keberhasilan manajemen

sangat tergantung kepada figure dan talenta pemimpinnya. Pengurus Korporasi Petani merupakan sosok yang akan memegang peranan sentral dan menentukan Lembaga profesional ini. Oleh karena itu dalam pemilihan pengurus harus dikawal secara ketat oleh Pembina dan tenaga ahli pendamping agar memperoleh kandidat yang tepat. Dalam hal ini, para Pembina dan tenaga ahli pendamping harus memulai dari awal untuk melihat calon-calon pengurus dari anggota korporasi secara mendalam. Baik dari segi kecakapan, perhatian dan aktivitas sebagai pelayan petani, kemampuan berkomunikasi, serta kejujuran dan rasa tanggung jawab. Kelima hal ini merupakan factor pokok sebagai dasar penilaian, sehingga pada waktu pemilihan bisa sedikit mengarahkan atau intervensi tetapi tidak kentara.

Titik kritis pengurus terletak ditangan pengurus inti yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Disamping pengurus inti ini, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari Badan pengawas yang berada diluar pengurus. Sesuai namanya, Badan pengawas berfungsi untuk mengawasi jalannya operasional korporasi, sama seperti Badan Pengawas pada kepengurusan Koperasi. Jabatan-jabatan ini harus dipegang oleh personal yang tepat yang loyal, cakap, berdedikasi tinggi, mempunyai keterampilan, jujur dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini bukan berarti jabatan lainnya tidak penting, sama tugasnya tetapi berbeda tanggung jawabnya. Jika korporasi tidak mempunyai tenaga seperti kriteria yang diinginkan, maka bisa diseleksi dan diangkat tenaga millennial dari luar petani anggota. Umpamanya anak petani yang berpendidikan tinggi, pintar, loyal dan mempunyai kemampuan komunikasi yang mumpuni. Atau tenaga dari luar petani yang dibayar untuk memimpin korporasi sesuai dengan tujuan pembangunannya secara profesional dan bertanggung jawab. System penggajian bisa diatur dan disepakati sesuai dengan potensi yang dimiliki, sebaiknya

proporsional dengan kinerja dan keuntungan korporasi. Dalam hal tenaga ahli pendamping dan Pembina harus aktif dalam membimbing petani dan pengurus lainnya untuk melakukan kesepakatan dengan tenaga profesional yang digaji. Prosedur dan keputusan ini harus dimasukkan kedalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga. Sebaiknya jangan memaksakan diri untuk memilih petani yang ada untuk menjadi pengurus utama sementara tidak ada personal yang dipandang cakap. Bisa juga tetap dipilih pengurus inti dari petani yang ada tetapi pembina dan tenaga pendamping harus bekerja keras untuk mendampingi agar Lembaga ini berjalan sesuai dengan scenario awalnya. Tetapi bila pengurus inti tersebut tidak bisa ditingkatkan kemampuan dan loyalitas serta tanggung jawabnya maka harus disiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Sebaiknya tenaga profesional dari luar petani, karena kepentingannya di korporasi hanya untuk memajukan dan meningkatkan skala usaha dan pendapatan korporasi. Karena semakin baik korporasinya dan semakin tinggi keuntungan korporasi maka pendapatan pengurus akan semakin besar.

Karena besarnya peran pengurus dalam korporasi, maka dalam menentukan pengurus lainnya juga harus memilih personal yang tepat, karena operasional korporasi sangat bergantung kepada loyalitas dan keterampilan para pengurus. Baik pengurus yang berkaitan dengan urusan operasional lapang dan teknis maupun pengurus yang berkaitan dengan administrasi. Begitu juga dengan pengurus yang bertanggung jawab dalam inisiasi usaha baru dan pengembangannya. Sebelum korporasi beroperasi, pembina dan pendamping harus melatih dan menjelaskan secara detil tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus serta pemahaman akan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sehingga waktu korporasi sudah berjalan, masing-masing pengurus sudah *on the track*.

Peran Pengurus. Dalam korporasi, yang dikategorikan sebagai pengurus inti adalah Ketua, Sekretaris dan bendahara ditambah dengan Ketua badan Pengawas. Kalau korporasi sudah besar dan banyak kesibukan maka untuk Sekretaris dan Bendahara bisa ditambah tenaga bantuan jika dibutuhkan. Kemudian untuk operasional lapang dipilih tenaga (petani) yang dipandang tepat, menguasai dan bertanggung jawab untuk bidangnya masing-masing. Kepala-kepala bidang ini bertanggung jawab dengan kemajuan korporasi yang dibidangnya. Mereka sangat menentukan keberhasilan korporasi secara menyeluruh. Bidang-bidang yang akan berperan antara lain usahatani, usaha pengolahan hasil, usaha industri rumah tangga, usaha sarana produksi, usaha alsintan, usaha koperasi, dan banyak lainnya sesuai dengan potensi. Bila bidang usaha cukup banyak maka perlu dibentuk Divisi Usaha agar tidak tumpang tindih dalam operasional lapang dan administrasi. Divisi yang diperkirakan akan berkembang adalah Divisi Usaha Pertanian (usahatani sesuai dengan potensi), Divisi Usaha Industri (pengolahan hasil, industri rumah tangga dan lainnya), Divisi Usaha Jasa (Alsintan, asset lainnya), Divisi Usaha Pelayanan (Koperasi, Warung Serba Ada dan lainnya). Jumlah Divisi dan Bidang sangat tergantung dengan kebutuhan dan potensi Kawasan. Secara umum, ada 5 (lima) peran utama dari pengurus Korporasi yang harus dibina dan didampingi oleh Tenaga Ahli sampai korporasi bisa berjalan mandiri, yaitu peningkatan kualitas sumberdaya petani anggota ; penguatan organisasi ; peningkatan produksi dan keuntungan ; penggalangan Kerjasama dan kemitraan ; penguatan modal dan pengembangan usaha. Muara semuanya adalah korporasi yang merupakan Lembaga profesional, setingkat Perseroan Terbatas milik petani. Korporasi seperti inilah yang diharapkan tumbuh dan berkembang sehingga bisa menjadi “mitra” pemerintah dalam pembangunan pertanian. Artinya, petani nantinya tidak lagi merupakan

binaan pemerintah, tetapi sudah beralih fungsi dan status menjadi *mitra pemerintah*.

Penguatan Kualitas SDM Anggota. Kualitas sumberdaya manusia petani merupakan Langkah awal dan tidak akan berhenti selama korporasi berjalan, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Karena mereka semua akan menentukan keberhasilan korporasi dalam membangun pertanian. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama selama proses operasional pada bidang masing-masing. Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan sarana yang resmi untuk beberapa pengurus dan petani yang harus diikuti. Tanpa Pendidikan (Moehar Daniel. 2011.a), pelatihan dan praktek lapang yang selalu dilakukan, sulit diharapkan kualitas sdm akan meningkat. Dalam hal ini juga perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi minimal setiap enam bulan sekali. Petani yang tidak mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan yang memadai tidak akan mudah menerima masukan yang berupa pembaharuan seperti “teknologi” dan system operasi Lembaga. Sementara teknologi dan system operasional Lembaga tersebut merupakan kata kunci dan “titik ungkit” dari kemajuan petani dan korporasinya. Tanpa teknologi yang tepat dan benar serta system kerja yang terstruktur dan penuh disiplin maka kemajuan tidak akan tercapai.

Perlu diperhatikan bahwa, gabungan individu-individu dalam sebuah kawasan akan menghasilkan budaya dari komunitas tersebut. Budaya inilah yang menonjol sebagai cerminan dari eksistensi komunitas tersebut baik dalam proses kehidupan sehari-hari maupun dalam proses usaha pertanian dan usaha-usaha lainnya. Secara sosiologi gabungan karakter ini bisa juga disebut sebagai “Corporate Culture” yang mencerminkan keberadaan dari komunitas atau populasi dimaksud. Bila kita perhatikan secara cermat, mungkin kita akan menyadari bahwa selama proses pembangunan pertanian selama

ini perhatian terhadap budaya ini sangat sedikit dicurahkan, sehingga proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani berjalan agak lambat. Pada hal, karakter individu dan corporate culture seharusnya mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dalam proses pembangunan. Karena pembangunan pertanian itu sama halnya dengan pembangunan sector lainnya, bahwa hal utama yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lebih dulu adalah “kualitas” sumberdaya manusianya. Dimana kualitas itu terletak pada “karakter individu” yang secara bersama akan membentuk “corporate culture” tadi.

Budaya atau sikap dan perilaku yang menonjol tentu dipengaruhi oleh karakter individu yang dominan didalam populasinya. Dan warna dari karakter-karakter yang menonjol tadi akan menimbulkan budaya yang berbeda dari bagian atau kelompok tertentu dari populasi. Jadi wajar saja bila dalam sebuah populasi atau komunitas terdapat berbagai kelompok budaya yang berbeda antara satu sama lain, dimana karakter-karakter individu yang sama dengan sendirinya akan tergabung dan memberi satu warna sebagai kelompok dalam populasi tersebut. Dengan demikian secara berjenjang bisa dikategorikan kelompok-kelompok karakter dari populasi dalam sebuah kawasan atau bagian yang kecil atau lebih luas dari kawasan, berbeda karena pengaruh karakter individu. Bila karakter individu lebih terbuka dan mempunyai pandangan yang jauh ke masa depan, maka mereka akan lebih terbuka dan mudah menerima pembaharuan. Bila karakter individu berpandangan sempit dan tidak mudah percaya kepada orang asing atau pembaharuan yang didiseminasikan maka kelompok ini merupakan kelompok yang bawah dan paling belakang dalam menerima inovasi. Disamping ada juga kelompok pertengahan yang berada diantara kelompok yang berpikiran lebih maju dan kelompok yang sulit menerima inovasi. Dengan memahami kondisi ini, pengurus akan berhasil

dalam manage para pengurus yang terpilih dalam korporasi petani.

Penguatan Organisasi. Tatakelola lembaga juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan korporasi dalam membangun pertanian, minimal di kawasannya. Oleh karena itu system organisasi harus dijalankan dengan disiplin sesuai dengan target dan tujuan yang dicapai. Semua aktivitas tentu tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan AD/ART yang telah ditetapkan. Kejelian dan kepiawaian pengurus serta perhatian dari Badan Pengawas sangat dibutuhkan untuk meluruskan jalannya system operasional, agar organisasi tetap kuat dan mantap. Evaluasi kinerja sendiri merupakan Langkah awal yang efektif untuk meluruskan jalannya organisasi, sebelum diaudit dari luar. Setiap langkah dan keputusan yang diambil pimpinan tentu sudah merupakan kesepakatan Bersama, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pengurus.

Peningkatan Produksi dan Keuntungan. Produksi dan keuntungan korporasi merupakan salah satu sentral penilaian kinerja pengurus. Pengurus inti harus memperhatikan dan mengawasi serta selalu mengevaluasi jalannya semua usaha dibawah korporasi. Kerjasama antar pengurus dan bidang-bidang usaha harus terjalin sedemikian rupa sehingga tidak ada kesalahan dan penyelewengan dalam penerapan rencana. Semua bidang usaha harus didalami oleh pengurus inti.

Pada hakekatnya, inti dari program ini adalah memasukan “roh kegiatan ekonomi” kedalam usaha pertanian yang dilakukan petani, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Dan yang menjadi inti dari gerakan dan perubahan ini adalah “*bagaimana caranya memasukan atau memadukan penerapan sistem usahatani dengan kegiatan pengembangan ekonomi, sehingga betul-betul efektif bagi pencapaian peningkatan produksi*

sekaligus pewujudan kesejahteraan petani”. Dengan istilah lain adalah bagaimana merekayasa kegiatan dan lembaga petani untuk bisa merubah petani yang selama ini identik dengan pekerja tani, menjadi petani profesional atau lebih tepat disebut “pengusaha pertanian”. Dengan sebutan ini sudah jelas petani itu adalah pengusaha karena kegiatan pertanian itu sendirinya sebenarnya adalah sebuah usaha.

Pengusaha pertanian mengartikan bahwa petani akan mempunyai posisi yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya seperti pedagang, agen, bahkan dengan eksportir maupun importir sekalipun. Disadari memang tidak mudah untuk menjadi seorang pengusaha apalagi kalau menjadi pengusaha yang sukses yang mampu memajukan usahanya, meningkatkan pendapatannya, menggaji karyawannya, bermitra baik dengan pengusaha lainnya dan segala macam ciri kesuksesan lainnya. Untuk itu sangat dibutuhkan kemampuan, bakat dan entrepreneurship seseorang yang akan menjadi pemimpin perusahaan itu. Disamping itu, keberhasilan pengembangan pengusaha juga membutuhkan kemampuan manajemen, butuh anggota dan pekerja yang ulet tangguh dan dapat dipercaya serta banyak syarat lainnya yang harus dipenuhi. Pertanyaannya. “mampukah seorang petani menjadi pimpinan perusahaan”?.

Inilah sebenarnya tantangan yang harus dan akan dijawab melalui korporasi petani. Kalau secara individu memang jarang ditemui petani yang berhasil menjadi seorang pengusaha (pertanian) yang sukses. Memang ada tetapi sangat sedikit jumlahnya dan terjadi lebih banyak disebabkan oleh bakat alamiah dan naluri bisnis yang dimilikinya. Tetapi bukan tidak mungkin pengusaha pertanian ini bisa diciptakan atau diwujudkan. Melalui korporasi, petani bisa dikembangkan dan dijadikan pengusaha pertanian yang sukses. Kata kuncinya adalah “*pembinaan yang intensif, konsisten dan berkelanjutan*”. Titik tumbuhnya terletak pada

pemahaman dan makna dari “korporasi” itu sendiri. Yaitu bagaimana menyatukan banyak petani yang bergerak dalam *satu komando dan satu manajemen*. Petani-petani yang harus bisa dan mau bersatu dan bekerjasama dengan sesama petani. Petani yang tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan yang mengarah ke perpecahan, kejadian sesaat, tidak emosional, mempercayai rekan kerja dan sebagainya, yang bermuara pada sebuah “**kebersamaan**”.

Sebagai Lembaga ekonomi petani, makanya semua usaha harus dijalankan secara professional agar efisien dan efektif. Tujuan utamanya adalah peningkatan produksi dan keuntungan. Baik usaha yang berhubungan dengan usahatani maupun usaha yang terkait dengan pertanian dan usaha lainnya yang dimiliki sesuai dengan potensi Kawasan. Dalam hal ini peran Pembina dan pendamping ahli harus intensif dan selalu berada by proses bersama petani. Paling tidak sampai petani dipandang cakap untuk melanjutkan usaha secara mandiri.

Penggalangan Kerjasama dan Kemitraan.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan korporasi, maka petani juga harus menjalin Kerjasama dengan para pelaku ekonomi lainnya yang berkaitan. Terutama para pengusaha terkait, pedagang dan pelaku industry pengolahan hasil. Kerjasama dan kemitraan ini akan sangat menentukan bagi keberlanjutan usaha dan perkembangannya. Karena sebagai pelaku ekonomi korporasi harus siap untuk bersaing, karena daya saing inilah yang akan menentukan posisi tawar korporasi. Kerjasama dan mitra yang sangat dibutuhkan adalah para pemasok sarana produksi, sekalipun nantinya korporasi sudah bisa menghasilkan sendiri sebagian sarana produksi yang dibutuhkan. Begitu juga halnya dengan Kerjasama dalam pemasaran produk produk yang dihasilkan, baik dengan konsumen langsung maupun dengan para pedagang terkait. Suatu saat bila korporasi

sudah besar dan berkembang besar kemungkinan korporasi mampu menggalang perjanjian kontrak dengan para konsumen. Karena dengan system kontrak fluktuasi harga bisa diatasi, motivasi peningkatan produksi tetap terjaga karena harus menyediakan produk sesuai perjanjian dan keuntungan yang diperoleh juga lebih terjamin dan berkelanjutan.

Penguatan Modal dan Pengembangan Usaha.

Setelah korporasi berkembang dan beroperasi secara stabil, pengurus harus mempunyai inisiatif untuk mengembangkan usaha yang telah ada, termasuk juga membangun usaha baru yang diperkirakan efektif dan sesuai dengan dukungan sumberdaya Kawasan. Kegiatan ini tentu akan membutuhkan penguatan modal yang juga harus diupayakan. Dalam hal perhitungan dan Analisa usaha harus tajam agar tidak mengalami kerugian dan usahanya mati sebelum berkembang. Analisis dalam pengembangan dan pembangunan usaha baru harus tajam dan penuh perhitungan serta pertimbangan. Keputusan ini harus diputuskan tidak hanya oleh pengurus sendiri tetapi harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan seluruh anggota. Tentu saja harus dilaksanakan Rapat anggota Tahunan karena azas korporasi sama persis dengan azas koperasi dimana suara tertinggi terletak ditangan anggota. Usaha baru yang dibangun harus melibatkan para anggota, baik yang aktif dalam usahatani maupun keluarga anggota. Karena tujuan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian terutama bagi Pembina dan pengurus korporasi adalah potensi usaha dan penempatan orang (anggota) yang akan mengelola usaha tersebut. Kredibilitas, integritas, kemauan, kemampuan serta kejujuran harus jadi patokan pertama, karena orang yang diangkat atau ditunjuk akan mengembang amanah orang banyak, serta amanah untuk dirinya sendiri

(berkaitan dengan usaha ekonomi). Yang penting semua anggota harus ditawarkan kesempatan untuk menjalankan usaha untuk peningkatan ekonomi keluarganya dan korporasi. Secara perlahan tetapi pasti korporasi yang dibangun lama-lama akan mengarah menjadi sebuah “holding Company” atau Perseroan Terbatas yang mempunyai banyak cabang atau anak usaha. Kondisi inilah yang menjadi sasaran utama pendirian korporasi dimana akan terwujud peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan petani, peningkatan cabang usaha, pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dalam kawasan, serta terwujudnya “kesejahteraan petani”.

Petani Mitra Pemerintah. Pada waktu korporasi sudah berkembang menguasai lahan usaha minimal sesuai Kawasan pertanian yang telah ditetapkan maka peran korporasi dan petani akan meningkat sebagai “mitra” pemerintah. Sebelumnya petani selalu menjadi “binaan” pemerintah di sini setiap kebutuhan terutama sarana produksi selalu menunggu bantuan. Bahkan kadang-kadang ada yang memanfaatkan kelompok tani sebagai umpan untuk mendapatkan bantuan, kalau tidak ada bantuan maka usahatani yang dilakukan sangat tidak efektif. Kondisi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga proses peningkatan produktivitas dan produksi tidak berjalan kalau pemerintah tidak menganggarkan dana yang besar untuk membantu petani. Adalah hal yang wajar bila pemerintah membantu petani, karena itu adalah konsekuensi pembangunan. Tetapi yang tidak layak adalah bantuan yang diberikan selalu dilakukan setiap tahun, sehingga ada petani yang selalu mendapat bantuan setiap tahun. Perkembangan ini menyebabkan Dinas atau instansi terkait selalu menganggarkan pengadaan sarana produksi setiap tahunnya. Tidak ada perubahan yang terjadi karena kondisi tersebut sudah menjadi rutinitas.

Secara perlahan tetapi pasti anggaran belanja pemerintah untuk membantu petani bisa turun bila korporasi petani bisa dibangun dan diwujudkan di setiap Kawasan pertanian yang telah ditetapkan. Karena korporasi bisa dijadikan mitra bagi pemerintah dalam kegiatan pembangunan pertanian, terutama dalam proses peningkatan produksi dan diversifikasi usaha. Pemerintah cukup membantu kelengkapan fasilitas dan infrastruktur, pinjaman modal dengan bunga rendah serta pembinaan dan pengawasan. Dengan posisi tawar yang kuat, petani bukan lagi sosok yang lemah dan tergolong kelas ekonomi bawah, tetapi sudah menjadi pengusaha pertanian yang profesional yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Kondisi inilah yang menjadi cita-cita dari penetapan Kawasan pertanian dan program pengembangannya berbasis korporasi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Perencanaan. 2013. Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045: Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan: Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, Jakarta. 184 hlm.
- Chambers R. 1996. PRA. Participatory Rural Appraisal. Memahami Desa Secara Partisipatif. Diterbitkan dalam kerja sama dengan Mitra Tani Yogyakarta. Penerbit Kanisus.
- Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Prentice Hall
- Elizabeth, R. 2007. Restrukturisasi Pemberdayaan Kelembagaan Pangan mendukung Perekonomian Rakyat di Perdesaan dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Makalah Simposium Tanaman Pangan V. 29-29 Agustus 2007. Puslitbangtan Pertanian. Bogor.
- Hendriadi, A. 2013. Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Berbasis Inovasi. Makalah

disampaikan pada Workshop Evaluasi dan Rencana Kegiatan Peningkatan Kinerja BPTP Tahun 2014. Bogor, 8 Januari 2014.

Iskandar Dinata. 2018. Definisi Analisis Kebijakan Publik. <https://syulhadi.wordpress.com/my-document/umum/analisis-kebijakan-publik/definisi-analisis-kebijakan-publik/>

Kementan. 2018. Kementan Siapkan Strategi Peningkatan Produksi Pangan. <https://katadata.co.id/berita/2018/12/06/kementan-siapkan-strategi-peningkatan-produksi-pangan-di-2019>

Kementerian Pertanian. 2017. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015. pertanian.go.id.

Malian AH. 2000. Analisis ekonomi usahatani dan kelayakan finansial teknologi pada skala pengkajian. Makalah disajikan dalam pelatihan Analisis Finansial dan Ekonomi bagi Pengembangan Sistem dan Usahatani Agribisnis Wilayah. Bogor, 29 November- 9 Desember 2000. 28 hal.

Moehar Daniel. 2011.a. Dilema Petani dan Masyarakat Kecil. Harian Haluan, 17 Agustus, 2011. Hal.4

Moehar Daniel. 2011.b. Organisasi, Jalan Menggapai Keberdayaan Petani. Harian Haluan, 8 Februari, 2011. Hal. 4

Moehar Daniel. 2016. Pemberdayaan Kelembagaan Pilihan Efektif Untuk Ciptakan Kesejahteraan Petani. Bagian dari Buku Potensi Teknologi Spesifik Lokasi Untuk Kesejahteraan Petani. Kristal Multi Media. Buklittinggi.

Pambudi, Himawan S. 2003. Politik Pemberdayaan Jalan Menuju Otonomi Desa. Lappera Pustaka Utama. Jogjakarta.

Pancar Simatupang. 2003. Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan.

Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1, No. 1, Maret 2003 : 1-21

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03. 2015. Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya TA 2015.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 16. 2006. Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Departemen Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 19. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 45. 2011. Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Kementerian Pertanian.

Quade, E.S. 1982. Analysis for Public Decisions, New York: Elsevier Science.